

LAMPIRAN 26 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM 14

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM 15

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 19

BAB IV PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 3

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota..... 15

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
BKPSDM Tahun 2024..... 18

Tabel 3.1 Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024..... 20

Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program,
dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2024 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah dibagi dalam beberapa tahap yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan dokumen yang bersifat makro sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. RPJPD merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun.

Perencanaan jangka menengah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen resmi perencanaan untuk periode lima tahun yang juga sering disebut sebagai agenda pembangunan yang akan dilaksanakan kepala daerah selama menjadi pemimpin pemerintahan.

Perencanaan jangka pendek tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat.

BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah daerah menjabarkan rencana kerja pemerintah daerah ini dalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa dalam rangka penyusunan RKPD setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Dimana yang dimaksud dengan rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada renstra perangkat daerah dan RKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani Visi dan Misi Bupati terpilih.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja PD berfungsi sebagai penyesuaian acuan serta arah organisasi dalam bertindak, berbuat dan menentukan program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu satu tahun. Dengan demikian penyusunan Perubahan Renja PD akan mengarahkan organisasi untuk berkiprah dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah dalam periode tahun anggaran berjalan.

Sesuai dengan hal-hal di atas, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan prioritas guna menjalankan fungsi pengelolaan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan aparatur agar mampu mencapai tujuan dan harapan pembangunan daerah.

Tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penyusunan Perubahan Renja BKPSDN Tahun 2024

| NO | Jenis / Tahapan Kegiatan | Jadwal |
|----|---|--|
| 1 | Penyusunan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 | Minggu I Juni s/d Minggu II Juli 2024 |
| 2 | Verifikasi rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Minggu III Juli s/d Minggu II Agustus 2024 |
| 3 | Penyempurnaan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 setelah verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Minggu III s/d Minggu IV Agustus 2024 |
| 4 | Penyempurnaan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2024 | Minggu I September 2024 |
| 5 | Penetapan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Daerah | Minggu II September 2024 |
| 6 | Penyelesaian dokumen Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 dan menyampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Minggu III s/d Minggu IV September 2024 |

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1); dan
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 40).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 adalah untuk terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan serta menjadikan pedoman perumusan penyempurnaan Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 ditujukan untuk:

- 1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja.
- 2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN 2024

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Bab ini berisi uraian tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan rencana kerja merupakan penyesuaian tahunan dari rencana strategis. Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Renja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam Perubahan Renja ini BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan kinerja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM yang menyebabkan perubahan target dan munculnya target kinerja baru. Namun secara keseluruhan dinamika penguatan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

| NO | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output) TAHUN 2021-2026 | TARGET RENSTRA BKPSDM PADA TAHUN 2026 (Akhir periode Rensrta BKPSDM) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA BKPSDM SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (2023) | | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPSDM TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPSDM YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja BKPSDM) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2024 | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--|--|--|-----------|---|-----------|--|-----------|---------------------------------|-----------|------|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (12) | | (13) = 6 + 12 | | (14) = 13/5*10 0% | (15) |
| | | | | K | Rp (juta) | % | Rp (juta) | K | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | % | Rp (juta) | | |
| A | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Akuntabilitas Kinerja BKPSDM | 85 | 6.711 | 65 | 8.491 | 75 | 5.305 | 19 | 1.012 | 19 | 1.005 | 38 | 2.018 | 86 | 10.510 | 102 | |
| I | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat Daerah | 100 | 50 | 80 | 74 | 100 | 15 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 80 | 79 | 158% | BKPSDM |
| II | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi BMD BKPSDM | 100 | 3.800 | 80 | 6.360 | 100 | 4.698 | 20 | 921 | 18 | 861 | 38 | 1.782 | 80 | 8.143 | 214% | BKPSDM |
| III | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKPSDM | 100 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | BKPSDM |
| IV | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum BKPSDM | 100 | 791 | 80 | 724 | 100 | 213 | 9 | 18 | 14 | 30 | 23 | 49 | 80 | 773 | 98% | BKPSDM |
| V | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Persentase pemenuhan pengadaan BMD BKPSDM | 100 | 900 | 80 | 28 | 100 | 60 | 0 | 0 | 10 0 | 59 | 10 0 | 59 | 80 | 88 | 10% | BKPSDM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----------------|--------|------|--------|
| | | | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan penyediaan jasa BKPSDM | 100 | 700 | 80 | 916 | 100 | 138 | 22 | 30 | 20 | 27 | 42 | 58 | 80 | 974 | 139% | BKPSDM |
| VII | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD BKPSDM | 100 | 450 | 80 | 387 | 100 | 179 | 22 | 36 | 16 | 26 | 38 | 63 | 80 | 450 | 100% | BKPSDM |
| B | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | IP ASN Sistem Merit IKM | 85 300 90 | 15.500 | 59 231 91 | 6.230 | 75 250 83 | 471 | 23 | 105 | 27 | 129 | 50 | 234 | 59 231 91 | 6.464 | 54 | |
| VII I | | Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penataan ASN | Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | 100 | 3.300 | 80 | 1.701 | 100 | 73 | 0 | 0 | 27 | 19 | 27 | 19 | 80 | 1.721 | 52% | BKPSDM |
| IX | | Meningkatnya kinerja ASN | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | 100 | 1.450 | 80 | 1.026 | 100 | 259 | 41 | 105 | 25 | 65 | 66 | 170 | 80 | 1.197 | 83% | BKPSDM |
| X | | Meningkatnya kualitas informasi dan layanan kepegawaian | Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | 100 | 9.750 | 80 | 2.997 | 100 | 71 | 0 | 0 | 50 | 36 | 50 | 36 | 80 | 3.033 | 31% | BKPSDM |
| XI | | | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | 100 | 1.000 | 80 | 504 | 100 | 67 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 7 | 80 | 512 | 51% | BKPSDM |
| C | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | IP ASN Sistem Merit IKM | 85 300 90 | 1.500 | 59 231 91 | 0 | 75 250 83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 231 91 | 0 | 0 | |
| XII | | | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM | 100 | 1.500 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | | BKPSDM |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | | | | | | 23.711 | 62 | 14.721 | | 5.795 | 19 | 1.117 | 20 | 1.135 | 39 | 2.252 | 72 | 16.974 | 72 | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja BKPSDM 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 102% atau dengan tingkat capaian 102%. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 158%, dengan tingkat capaian 158%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 214%, dengan tingkat capaian 214%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 98%, dengan tingkat capaian 98%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 10%, dengan tingkat capaian 10%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 139%, dengan tingkat capaian 139%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 100%, dengan tingkat capaian 100%.

2. Program Kepegawaian Daerah

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 54% atau dengan tingkat capaian 54%. Hal ini terjadi karena adanya refocussing anggaran dimulai dari tahun 2020 karena adanya pandemi covid 19. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 52%, dengan tingkat capaian 52%.

- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 83%, dengan tingkat capaian 83%.
- c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 31%, dengan tingkat capaian 31%.
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target pencapaian kinerja 100% terealisasi sebesar 51%, dengan tingkat capaian 51%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 0% atau dengan tingkat capaian 0%. Hal ini terjadi karena penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pemutakhiran nomenklatur pada sistem Aplikasi SIPD RI. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini dimunculkan mulai tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan bidang urusan pendidikan. Hal ini berimplikasi terhadap rasionalisasi pagu indikatif awal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKPSDM dan peraturan perundang-undangan di atas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik IKU Kepala Daerah maupun IKU Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Lima Puluh Kota

| N O | INDIKATOR | SPM | I K K | IKU PD | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|--------|--|-----|-------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | v | | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | | v | | 12,6 | 12,8 | 13 | 15 | 10 | 30 | 13 | 15 | |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | v | | 45 | 50 | 65 | 80 | 40 | 3 | 65 | 80 | |
| 4 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | | v | | 250 | 300 | 400 | 500 | 498 | 404 | 400 | 500 | |
| 5 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan) | | v | | 68 | 70 | 75 | 80 | 79,41 | 97 | 75 | 80 | |
| 6 | Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan) | | v | | 15 | 25 | 35 | 40 | 33,83 | 20 | 35 | 40 | |
| 7 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan) | | v | | 100 | 100 | 100 | 100 | 33,15 | 40,84 | 100 | 100 | |
| 8 | Merit System | | | v | Kurang | Baik | Baik | Sangat Baik | 130 | 231 | 275 | 285 | |
| 9 | Indeks Profesionalitas ASN | | | v | 68 | 70 | 75 | 80 | 52,72 | 59,51 | 75 | 80 | |
| 10 | Tingkat akurasi data kepegawaian | | | v | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | v | 78 | 80 | 83 | 85 | 80,95 | 91,18 | 83 | 85 | |
| 12 | Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM | | | v | 68 | 70 | 75 | 80 | 65,86 | 65,60 | 75 | 80 | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM yang selalu diupayakan penanganannya, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 ini masalah yang timbul dapat diminimalisir dan cepat dicarikan pemecahannya.

Sampai dengan saat ini, permasalahan yang masih muncul dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil.
2. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas.
3. Disiplin ASN masih rendah, kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kedisiplinan ASN dan kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan disiplin.
4. Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi.
5. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugas.
6. Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi.
7. Belum optimalnya dan terintergrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.
8. Data-data individu ASN tidak semua ter-update di SAPK.
9. Angka indeks profesionalitas ASN dengan kategori rendah.
10. Terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat.
11. Kuota peserta pelatihan yang disediakan penyelenggara terbatas

12. Diklat yang diikuti belum sesuai kompetensi.

Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengantisipasi permasalahan yang ada antara lain:

1. Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan konsistensi dalam memberlakukan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sipil Negara dengan memberikan fasilitasi kepada aparatur sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Mengoptimalkan pemetaan aparatur sipil Negara melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil Negara melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik government (egovernment) dengan penerapan absensi online;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi.
6. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu berdasarkan hasil perencanaan, analisis perancangan dan desain sistem;
7. Menyempurnakan SPM dan SOP setiap jenis kegiatan;
8. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran belanja modal;
9. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pengalokasian yang proposional;

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, BKPSDM tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang, baik mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja BKPSDM. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKPSDM Tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | CATATAN |
|----|------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Terutama pada target-target yang belum tercapai dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang. Bab ini berisi tabel rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2024. Renja perubahan ini dipastikan data program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu dana sama dengan data Perubahan RKPD 2024.

Adapun mengenai uraian Rencana Kerja dan Pendanaan kegiatan BKPSDM Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.1 di halaman berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N | TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD | REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022 | PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELO MPOK SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB |
|----|------------------|---|--|--|--|---|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertamba h/ Berkuran g (10-12) | LOKA SI | SUMBE R DANA | PRIORITAS | | | TAR GET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBE LUM | SESU DAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBA HAN 2024 | | | | NASI ONAL | DAE RAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | 5.518.160 .350,00 | 5.795.003 .317,00 | 6.002.413 .279,00 | 484.252.9 29,00 | | | | | | 17.952.000 .000,00 | |
| | 5 | UNSUR PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN | | | | | | | 5.518.160 .350,00 | 5.795.003 .317,00 | 6.002.413 .279,00 | 484.252.9 29,00 | | | | | | | 17.952.000 .000,00 | |
| | 5.03 | KEPEGAW AIAN | | | | | | | 5.268.160 .350,00 | 5.776.803 .317,00 | 5.984.213 .279,00 | 716.052.9 29,00 | | | | | | | 15.452.000 .000,00 | |
| 1, | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA | - | | | | - | - | 4.263.215 .350,00 | 5.305.479 .317,00 | 5.361.500 .079,00 | 2.633.784 .650,00 | | | | | | | 6.897.000. 000,00 | |
| | 5.03.01.2. 01 | Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Capain Kinerja BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 24.998.00 0,00 | 15.318.00 0,00 | 15.318.00 0,00 | - 9.680.000 ,00 | | | - | - - | BKPSD M | | 40.000.000 ,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|----------------|--|------------------|--|
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 24.998.000,00 | 15.318.000,00 | 15.318.000,00 | - 9.680.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarkannya gaji honorarium dan tunjangan pegawai | | | | 100 % | 100 % | 3.240.860.550,00 | 4.698.627.317,00 | 4.754.648.079,00 | 1.513.787.529,00 | | | - | - | Pegawai BKPSDM | | 5.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 3.240.860.550,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.240.860.550,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------|--|------------------|--|
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | - | 840 Orang / bulan | 0,00 | 4.698.627.317,00 | 4.754.648.079,00 | 4.754.648.079,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhi Administrasi BMD BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.400.000,00 | | | - | - | BKPSDM | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhi Administrasi Umum BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 335.066.800,00 | 213.644.000,00 | 213.644.000,00 | - 121.422.800,00 | | | - | - | BKPSDM | | 577.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 20 Paket | 20 Paket | 11.000.000,00 | 7.789.500,00 | 7.789.500,00 | - 3.210.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|--------|--|--|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | sa | | | | | | | |
| | 5.03.01.2. 06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n | | | | 50 Paket | 50 Paket | 65.000.00 0,00 | 51.419.50 0,00 | 51.419.50 0,00 | - 13.580.50 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 100.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2. 06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n | | | | 10 Paket | 10 Paket | 64.999.80 0,00 | 51.635.00 0,00 | 51.635.00 0,00 | - 13.364.80 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 100.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2. 06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n | | | | 12 Doku men | 12 Doku men | 10.992.00 0,00 | 9.900.000 ,00 | 9.900.000 ,00 | - 1.092.000 ,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 12.000.000 ,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|--|---|--------|------------|--|--------------------|---|
| | 5.03.01.2. 06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4000 Lapor an | 4000 Lapor an | 33.125.00 0,00 | 19.400.00 0,00 | 19.400.00 0,00 | - 13.725.00 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 100.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2. 06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Lapor an | 200 Lapor an | 149.950.0 00,00 | 73.500.00 0,00 | 73.500.00 0,00 | - 76.450.00 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 250.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2. 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentas e Pemenuh an Pengadaa n Barang Milik Daerah BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 225.000.0 00,00 | 60.000.00 0,00 | 60.000.00 0,00 | - 165.000.0 00,00 | | | - | - - | BKPSD M | | 300.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2. 07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n | | | | 5 Unit | 5 Unit | 75.000.00 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 75.000.00 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) | - | - - | | | 150.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|---|---|--------|--|----------------|--|
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 150.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - 90.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 211.000.000,00 | 138.550.000,00 | 138.550.000,00 | - 72.450.000,00 | | | - | - | BKPSDM | | 670.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - 1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.000.000,00 | 50.550.000,00 | 50.550.000,00 | - 5.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|----------------------------------|---|---|--------|--|----------------|--|
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 150.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | - 66.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 600.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 223.890.000,00 | 179.340.000,00 | 179.340.000,00 | - 44.550.000,00 | | | - | - | BKPSDM | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 23 Unit | 23 Unit | 208.890.000,00 | 164.340.000,00 | 164.340.000,00 | - 44.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | sa | | | | | | | | |
| 2, | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nilai Indeks Profesionalitas ASN | | | | 1.75 1.75 % | 1.75 1.75 % | 1.004.945 .000,00 | 471.324.0 00,00 | 622.713.2 00,00 | 7.550.055 .000,00 | | | | | | | 8.555.000. 000,00 | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Kenaikan Nilai IP ASN dan Indeks Sistem Merit | | | | 75 % | 75 % | 284.972.0 00,00 | 73.225.00 0,00 | 224.614.2 00,00 | - 60.357.80 0,00 | | | - | - | ASN Kabupaten Lima Puluh Kota | | 1.950.000. 000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.00 0,00 | 11.650.00 0,00 | 11.650.00 0,00 | - 23.350.00 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|--|--|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|---|---|--|--|------------------|--|
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 32.575.000,00 | 183.964.200,00 | 68.964.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 50.000.000,00 | 19.275.000,00 | 19.275.000,00 | - 30.725.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 29.985.000,00 | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | - 23.635.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | sa | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 19.987.000,00 | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | - 16.612.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merit | | | | 75 % | 75 % | 274.997.000,00 | 259.125.000,00 | 259.125.000,00 | - 15.872.000,00 | | | - | - | ASN Kabupaten Lima Puluh Kota | | 1.150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 25.000.000,00 | 17.450.000,00 | 17.450.000,00 | - 7.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------|---|--|----------------------|---|
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1500 Dokumen | 1500 Dokumen | 49.997.00 0,00 | 42.025.00 0,00 | 42.025.00 0,00 | - 7.972.000 ,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 200.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 400 Dokumen | 400 Dokumen | 200.000.0 00,00 | 199.650.0 00,00 | 199.650.0 00,00 | - 350.000,0 0 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 750.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merit | | | | 75 % | 75 % | 419.990.0 00,00 | 71.900.00 0,00 | 71.900.00 0,00 | - 348.090.0 00,00 | | | - | - - | ASN Kabupaten Lima Puluh Kota | | 5.120.000. 000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 71.900.00 0,00 | 71.900.00 0,00 | 71.900.00 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 120.000.00 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|--|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|--|
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 259.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 259.990.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIB USI JASA UMUM | - | - | | | 2.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 160.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merit | | | | 75 % | 75 % | 24.986.000,00 | 67.074.000,00 | 67.074.000,00 | 42.088.000,00 | | | - | - | ASN Kabupaten Lima Puluh Kota | | 335.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.986.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | - 18.186.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|---|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|---|--|--|---------------|--|
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | - | 6500 Dokumen | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 9.274.000,00 | 9.274.000,00 | 9.274.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | - | 6500 Orang | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | - | 6500 Laporan | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|--|--|--|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------|--|
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | - | 6500 Dokumen | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | 250.000.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | -231.800.000,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | |
| 1, | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | - | | | | - | - | 250.000.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 2.250.000.000,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | - | | | | - | - | 250.000.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | -231.800.000,00 | | | - | - | ASN Kabupaten Lima Puluh Kota | | 2.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | | 350 Orang | 350 Orang | 250.000.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | -231.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | J U M L A H | | | | | | | | 5.518.160.350,00 | 5.795.003.317,00 | 6.002.413.279,00 | 484.252.929,00 | | | | | | 17.952.000.000,00 | | |

Sedangkan rekapitulasi tabel kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

| No | Bidang Urusan | 2025 | | | 2026 | | | Ket |
|-----|-----------------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|---------------------------------|-----|
| | | Jumlah | | Total Pagu (Rp) | Jumlah | | Total Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| 1 | Kepegawaian | 2 | 11 | 5.984.213.279 | 2 | 11 | 15.452.000.000 | |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 1 | 18.200.000 | 1 | 2 | 2.500.000.000 | |

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHMAD ZAKRI